

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pembangunan pertanian di Indonesia masih dianggap penting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang masih bergantung pada sektor pertanian meskipun demikian Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada periode 2003-2013 kontribusi di sektor pertanian pada Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 15,19 persen menjadi 14,43 persen. Padahal jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tertinggi yakni 38,07 juta orang. Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dengan persentase 34,6 persen dari jumlah tenaga kerja, sedangkan kontribusi terhadap PDB sebesar 15 persen. (Badan Pusat Statistik,2015)

Sektor pertanian harus dapat perhatian besar demi kesejahteraan masyarakat dan petani. Pembangunan pertanian dapat berkembang dengan baik karena didukung adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sehingga tercapainya swasembada pangan Indonesia di tahun 1984. Program intensifikasi yang dikenal dengan pancausahaatani berupa pengolahan tanah, pemberantasan hama, pemupukan, penggunaan bibit unggul dan sistem pengairan yang baik.

Sektor pertanian merupakan pengguna air terbesar diantara sektor-sektor lainnya. Lebih dari 80 persen pemanfaatan air di Indonesia digunakan untuk mendukung budidaya usahatani. Oleh karena itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting sehingga dapat dikatakan bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga kegiatan pertanian tidak terlepas dari air.

Menurut Fauzi (2006) seiring bertambahnya penduduk dan eskalasi pembangunan ekonomi, fungsi ekonomi dan sosial air sering terganggu karena semakin kritisnya suplai air, sementara permintaan terus meningkat. Bahkan dilihat dari sisi geopolitik, para ahli memprediksi bahwa air akan menjadi sumber konflik di abad 21 ini. Hal ini disebabkan meski sumber daya air secara geofisik dikatakan melimpah, hanya sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan secara langsung.

Penggunaan air sendiri pada dasarnya terbagi ke dalam dua kelompok yaitu: kelompok konsumtif, yakni mereka yang memanfaatkan suplai air untuk konsumsi dan kelompok non-konsumtif. Kelompok konsumtif antara lain rumah tangga, industri, pertanian dan kehutanan. Di sisi lain kelompok non-konsumtif memanfaatkan air hanya sebagai medium pertumbuhan ikan pada kasus perikanan, sumber energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air dan untuk rekreasi.

Konsep pengelolaan air dan sumber daya air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air. Berupa menyalurkan (*redistributing*) air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, komponen mutu serta komponen volume (jumlah) pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air adalah alokasi dan distribusi air. Alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna. Selain fungsi air untuk kebutuhan sehari-hari, air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi. Sementara itu air semakin hari semakin langka padahal merupakan salah satu sarana produksi pertanian. Apabila sistem pengairan dan penggunaan air belum teratur maka akan mengakibatkan pola usahatani dan maupun waktu tanam yang tidak sama diantara petani.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumberdaya air pada pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa sumberdaya air ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan pula pada pasal 29 ayat 3 bahwa penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumberdaya air di atas semua kebutuhan.

Pembangunan subsektor irigasi perlu dilakukan karena untuk menunjang program peningkatan produksi pertanian dengan tujuan utama swasembada beras. Selain itu, peningkatan produksi pertanian juga bertujuan untuk melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan

kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan irigasi untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem irigasi secara efisien dan efektif.

Pada prinsipnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan pengelolaan sistem irigasi.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mana produksi dan produktivitas padinya cukup tinggi. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 produksi dan produktivitas padi cenderung meningkat setiap tahunnya (Lampiran 1). Dimana pada tahun 2015 produksi padi di Sumatera Barat mencapai 2.550.609 ton/ha dan produktivitasnya mencapai 50,25 kwintal/ha.

Tingginya tingkat produksi dan produktivitas padi di Sumatera Barat salah satunya di pengaruhi oleh sistem pengairan dan jaringan irigasi yang yang baik. Lahan sawah yang beririgasi teknis yang ada di Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar 62.740 ha dan untuk lahan sawah yang memiliki irigasi sederhana yang ada di provinsi Sumatera Barat adalah mencapai 30.979 ha. Di samping adanya lahan beririgasi, di Sumatera Barat juga terdapat lahan sawah yang masih tadah hujan dimana pengairan yang masih mengandalkan air hujan, yaitu sekitar 30.979 ha.

Badan pusat statistik Sumatera Barat pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa dari total keseluruhan jaringan irigasi yang telah dibangun untuk mengairi lahan sawah, semuanya tidak berfungsi dengan baik. Seperti halnya di salah satu Kabupaten di provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki lahan sawah yang cukup luas dengan berbagai jenis pengairannya, menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 luas lahan sawah dengan berbagai pengairannya mengalami penurunan dari 3.931 ha menjadi 3.624 ha. Penurunan luas lahan sawah yang beririgasi terjadi karena jaringan irigasi yang ada mengalami kerusakan. (Lampiran 2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan

sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut dilanjutkan pada pasal yang sama ayat 2 yang menyatakan bahwa pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani.

Adanya kebijakan tersebut mendorong petani pemakai air bersifat mandiri dalam pengelolaannya, baik berkaitan dengan pelaksanaan O&P atau pembiayaannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air pasal 77 ayat (1) bahwa pembiayaan pengelolaan sumberdaya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumberdaya air.

Dijelaskan pula pada pasal 78 ayat (3) bahwa pembiayaan pelaksanaan konstruksi, O&P sistem irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani, sedangkan pembiayaan konstruksi sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani dan dapat dibantu pemerintah pusat dan atau Pemerintah Daerah.

B. Rumusan Masalah

Kecamatan 2 X 11 Kayutanam merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan 2 x 11 Kayutanam memiliki tingkat produktivitas padi yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Terhitung pada tahun 2014 produksi padi di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam adalah sebesar 20.328,00 ton dan rata-rata produktivitas padi adalah 5,50 ton/hektar dengan luas panen 3.696 Ha. Kecamatan 2 X 11 Kayutanam memiliki luas lahan sebesar 13,383 Ha, dimana merupakan kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan 2 x 11 Kayutanam memiliki lahan sawah seluas 1.589 Ha. (BPS Padang Pariaman, 2014)

Di kecamatan 2 x 11 kayutanam tidak semua lahan sawah yang pengairannya baik . Sebagian lahan sawah yang ada masih merupakan sawah tadah hujan atau sering disebut sebagai sawah banda langik oleh masyarakat. Rata-rata produksi padi per hektarnya di daerah atau lahan sawah yang tadah hujan ini adalah

sebesar 2,014 ton/ha atau sekitar 2.014 kg/ha. Apabila diestimasi dalam setahun, maka jumlah produksi padi sawah tersebut adalah 6.042 kg/ha/tahun atau 6,042 ton/ha/tahun. Jika dikalkulasikan dengan luas lahan sawah yang ada yaitu 25 ha, maka total produksi padi di lahan tadah hujan tersebut adalah 151,05 ton/tahun. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya jaringan irigasi. Oleh karena petani untuk berusahatani padi hanya mengandalkan air hujan.

Lain halnya di daerah yang lahan sawahnya bukan sawah tadah hujan, yaitu lahan sawah yang sudah memiliki saluran air dan tidak bergantung pada air hujan serta lahan sawah yang sudah memiliki jaringan irigasi namun masih belum beroperasi dengan baik karena adanya kerusakan pada jaringan irigasi. Namun produksi padinya sudah lumayan tinggi dibandingkan lahan sawah yang non irigasi (tadah hujan) yaitu sekitar 3,515 ton/ha/MT atau sekitar 3.515 kg/ha/MT. Apabila diestimasi dalam setahun, maka jumlah produksi padi sawah tersebut adalah 10.545 kg/ha/tahun atau 10,545 ton/ha/tahun. Dan produksi padi tersebut masih jauh berbeda dengan produktivitas padi di daerah yang sudah memiliki irigasi pada umumnya yaitu sekitar 4,5 sampai dengan 6 ton/ha (Dinas Pertanian Kecamatan 2 X 11 Kayutanam) . Kondisi ini terjadi karena lahan sawah disini sudah memiliki jaringan irigasi. Hanya saja perlu kesadaran dari petani untuk menjaga agar jaringan irigasi tetap beroperasi dengan baik sehingga usahatani padi sawah yang di laksanakan tetap berjalan sesuai dengan harapan.

Peran irigasi untuk meningkatkan produksi padi sangat besar sehingga perlu didukung dengan pembangunan dan pengelolaan air irigasi yang efisien. Saat ini petani belum ada menerapkan iuran untuk memperbaiki sistem pengairan agar berjalan lebih baik. Hal ini berawal dari pola pikir petani yang menganggap bahwa air adalah barang publik yang ketika musim hujan akan melimpah. Pada musim kemarau baru petani menyadari bahwa begitu berharganya sumberdaya air, apalagi untuk usahatani padi sawah.

Terjadinya kelangkaan air untuk usahatani padi sawah menggambarkan bahwa air yang selama ini digunakan atau dimanfaatkan untuk usahatani padi sawah memiliki nilai, dimana apabila terjadi kelangkaan air maka akan mengakibatkan penurunan produksi sehingga penerimaan yang diterima petani juga berkurang. Dengan berkurangnya penerimaan maka pendapatan petani juga berkurang.

Dengan memperhatikan masalah-masalah terkait dengan sumberdaya air untuk usahatani padi sawah maka disini akan dilakukan penelitian mengenai sejauh mana petani menilai sumber daya air secara finansial dengan mengestimasi nilai *Willingness to Pay* (WTP) petani. Besarnya WTP petani tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kesediaan petani membayar iuran untuk air irigasi.

Secara khusus pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kesediaan membayar petani (*Willingness to Pay*) terhadap peningkatan pelayanan irigasi ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesediaan membayar petani (*Willingness to Pay*) terhadap peningkatan pelayanan irigasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengestimasi besarnya nilai *Willingness to Pay* (WTP) petani terhadap peningkatan pelayanan irigasi.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Willingness to Pay* (WTP) petani terhadap peningkatan pelayanan irigasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana APBD Kabupaten Padang Pariaman untuk pengelolaan irigasi.
2. Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam penetapan iuran irigasi guna pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah setempat.
3. Dinas Pengairan dalam menentukan kebijakan tarif iuran air irigasi.
4. Peneliti sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.